

BAB V

PENUTUP

Dari uraian yang telah dikemukakan oleh penulis, maka sebagai penutup dari laporan ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan terhadap pengamatan magang dan disertai saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan organisasi bersangkutan.

5.1 Kesimpulan

Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam mengelola keuangannya dimulai tahun 2010. Pengelolaan Keuangan tersebut dilaksanakan berdasarkan dasar hukum dan juga prinsip dasar Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai beberapa perangkat sistem informasi dan beberapa komponen sistem informasi. Perangkat sistem informasi yang paling penting pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah manusia, dimana manusia merupakan bagian utama dalam suatu sistem informasi, tanpa adanya karyawan maka perangkat sistem informasi lainnya tidak ada yang mengoperasikan. Pengoperasian tidak akan berjalan lancar tanpa adanya komponen sistem informasi. Komponen Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang paling banyak digunakan adalah komponen input, karena komponen input merupakan data yang masuk ke dalam sistem informasi, maka jika input tidak ada berarti output tidak mungkin ada nantinya di sistem informasi.

Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang paling banyak digunakan adalah modul *core system*, karena modul ini merupakan modul aplikasi inti dari Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Modul ini terdiri dari modul perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses pengelolaan keuangan daerah, yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan hingga ke tahap pertanggungjawaban. Fungsi utama dari Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah membantu kinerja aparatur pemerintah dalam mewujudkan transparansi keuangan daerah yang akuntabel, sesuai tuntutan peraturan perundangan yang berlaku saat ini.

Masalah utama dalam penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah kurangnya pemahaman pengguna atau karyawan terhadap mekanisme pengoperasian aplikasi. Contohnya antara lain belum dilakukannya proses perhitungan dan belum dilakukan beberapa setting yang dibutuhkan. Untuk permasalahan kurangnya pemahaman pengguna atau karyawan terhadap mekanisme pengoperasian aplikasi pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah perlu klarifikasi dari yang menerima pengaduan, khususnya untuk mengklarifikasi bahwa proses-proses yang dibutuhkan untuk mengeluarkan report tersebut telah dipenuhi oleh pengguna atau karyawan, jika ternyata belum maka solusi untuk masalah ini adalah edukasi tentang cara mengoperasikannya.

5.2 Saran

Berdasarkan pendapat penulis, implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat memberikan manfaat bagi penggunanya dan dapat membantu pengelolaan keuangan dengan baik. Namun demikian, masih diharapkan peningkatan menu aplikasi yang akan semakin melengkapi kebutuhan pekerjaan kedepannya. Pada karyawan yang kurang memahami tentang mekanisme pengoperasian aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah diberikan pendidikan dan pelatihan tentang pengoperasionalan sistem bagi karyawan, karena karyawan merupakan faktor penentu kesuksesan implementasi sistem informasi keuangan menjadi efektif dan efisien.